



LURAH BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BATURETNO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Baturetno Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan Baturetno tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Baturetno tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 28);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
32. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2019 Nomor 4);
33. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 7);
34. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8).
35. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
36. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BATURETNO

dan

LURAH BATURETNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BATURETNO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Kalurahan	Rp. 5.208.099.834,00
(2) Belanja Kalurahan	Rp. 5.797.158.699,00
Defisit	Rp. (589.058.865,00)
(3) Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 589.058.865,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 589.058.865,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara terulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Baturetno.

Ditetapkan di Baturetno
Pada tanggal 30 Desember 2024
LURAH BATURETNO,
TTD
SARJAKA

Diundangkan di Baturetno
Pada tanggal 30 Desember 2024
CARIK BATURETNO,
TTD
MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (9 /BATURETNO/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Baturetno
Kepala Urusan Pangripta,



SUMARMANTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BATURETNO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	739.650.147,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.458.449.687,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.208.099.834,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.987.237.491,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.218.801.480,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.128.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.128.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	628.324.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	628.324.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.960.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.960.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	670.747.593,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	670.747.593,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	110.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	110.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	43.341.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.341.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	80.500.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	53.980.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.980.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	10.800.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	22.310.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	22.310.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	81.250.949,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	81.250.949,00	
1.1.95		Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K	134.179.366,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	134.179.366,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	103.635.924,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	103.635.924,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	175.543.848,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	175.543.848,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	269.260.100,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.600.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	27.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	72.050.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.050.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	169.610.100,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	169.610.100,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	55.056.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.500.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.430.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.430.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.100.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	24.436.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.436.000,00	
1.3.90		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	18.590.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.590.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	361.820.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	47.617.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.617.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	51.855.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.855.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	57.162.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.162.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	21.925.500,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.925.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.200.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	24.560.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.560.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17.210.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.210.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.490.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.490.000,00	
1.4.91		Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engineering Drawing (DED)	6.600.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.92		Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	91.890.000,00	DDS
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.890.000,00	
1.4.92	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
1.4.95		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal	6.020.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	
1.4.96		Biaya Operasional Padukuhan	10.290.000,00	PBK
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.290.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	82.299.911,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	11.080.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	47.656.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.656.000,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	9.683.911,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	9.683.911,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	13.880.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.880.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.594.560.542,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	102.810.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.100.000,00	PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	32.560.000,00	PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.560.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	9.050.000,00	PBK
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	39.300.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	560.048.288,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	139.071.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.071.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.582.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.582.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.290.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	232.635.288,00	DDS, PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.590.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	98.045.288,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	12.610.000,00	DDS, PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.610.000,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	7.936.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.936.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	5.450.000,00	PBH
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	62.176.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.176.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	22.440.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.440.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	26.558.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.558.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	521.544.494,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	360.619.494,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	360.619.494,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	130.925.000,00	DDS, PBH, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	130.925.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	30.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	66.284.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	47.774.000,00	PAD, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.984.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	1.790.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	18.510.000,00	PBK
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.510.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	190.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	10.710.000,00	PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.710.000,00	
2.5.93		Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	179.440.000,00	PBK
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.440.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	153.723.760,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	24.055.000,00	PAD
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.955.000,00	
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	100.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	121.493.760,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	121.493.760,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8.175.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.175.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>557.246.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	97.645.500,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20.120.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.120.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	14.390.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.390.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.120.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.528.000,00	DDS, PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.528.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	26.157.500,00	DDS, PBH
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.157.500,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalura han	18.330.000,00	DDS
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.330.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	229.728.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	99.265.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.265.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	38.978.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.978.000,00	
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	90.685.000,00	PAD, PBH, PBP
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.685.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pelaksanan MTQ/MHQ/PORSADIN	800.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	89.244.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a	11.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	14.400.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	47.644.000,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	47.644.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.700.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	140.629.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	53.580.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.580.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	56.399.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.399.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	30.650.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.650.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>458.114.166,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	400.900.166,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	119.702.666,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	119.702.666,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	27.288.500,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.288.500,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	28.785.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	28.785.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	6.215.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.215.000,00	
4.2.92		Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	72.350.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.350.000,00	
4.2.94		Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan	146.559.000,00	DDS
4.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.559.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.384.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa	3.384.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.384.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.910.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.120.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	9.250.000,00	PBK
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
4.4.92		Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif	6.540.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	34.920.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	14.640.000,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	
4.5.90		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	20.280.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.280.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>200.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	198.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.90		BLT DD	198.000.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.797.158.699,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(589.058.865,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	589.058.865,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	589.058.865,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LURAH BATURETNO,

TTD

SARJAKA